

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum masuknya agama Islam ke daerah Riau tidak ada seorang pun dari penduduk Riau yang menganut agama tauhid. Agama penduduk asli adalah *animisme* yang percaya roh nenek moyang dan para leluhur kemudian menyusul pada sebagian penduduk mereka yang beragama Budha dan sekali berkembang menjadi Hindu-Budha. Islam awalnya terutama berkembang di daerah-daerah, yaitu, Kuntu- Kampar, Rokan, Kuantan, Indragiri dan Tapung.¹

Menurut sejarah Riau Kuntu-Kampar Kiri adalah daerah pertama-tama di Riau Daratan yang berhubungan dengan orang Islam (para pedagang). Hal ini dimungkinkan karena sejak zaman bahari daerah ini telah berhubungan dengan pedagang-pedagang asing dari negeri China, India dan Arab-Persia. Hubungan tersebut didasarkan oleh kepentingan perdagangan karena daerah lembah Sungai Kampar Kanan/Kiri merupakan daerah penghasil lada terpenting di dunia dalam periode 500-1400 SM. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau daerah Kuntu-Kampar yang mula-mula dimasuki agama Islam.²

Berdasarkan perjalanan para penyiar agama Islam yang datang sebagai pedagang itu, besar kemungkinan pada abad pertama hijriah atau abad ke-7 M agama Islam itu telah sampai di Riau. Sebagaimana juga disimpulkan dalam seminar masuknya Islam ke Nusantara di Aceh tahun 1980. Meskipun Islam itu

¹ Suwardi, dkk, *Sejarah lokal Riau*, (Pekanbaru: PT. Sutra Benta Perkasa, 2014), hlm.29

² Muchtar Lutfi, dkk, *Sejarah Riau*, (Pekanbaru: Biro Bina Sosial Setwilda Tk. I, Riau, 1996) hlm.165

telah masuk pada abad ke-7 atau 8 Masehi di Riau, namun penganut agama ini masih terbatas di lingkungan para pedagang dan penduduk kota di pesisir pantai tersebut. Hal ini disebabkan kuatnya pengaruh agama Budha yang merupakan “agama negara” di Kerajaan Sriwijaya waktu itu.³

Pada permulaan abad ke-7 sesudah Rajendra Cola dari India Selatan berhasil melumpuhkan Sriwijaya. Maka Raja Palembang bernama Aria Darma mengirim surat ke Muawiyah meminta dikirimkan Ulama/ Mubaligh. Menindak lanjuti permintaan Raja Palembang tersebut, maka Khalifah Muawiyah mengutus Syekh Burhanuddin. Yang akhirnya sampai ke Kuntu untuk mengembangkan Islam Mazhaf Syafi’i kurang lebih selama 20 tahun.⁴

Dari Kuntu Islam diperkirakan menyebar ke Rokan dalam tahun 783 H (1349). Saat mereka datang ke daerah ini Rokan sudah memiliki kehidupan bermasyarakat yang teratur, dipimpin oleh seorang sultan yang berkedudukan sebagai *Primus interperes* bernama Raja Said. Masuknya pelarian-pelarian muslim dari Kuntu berhasil membawa pengikut-pengikut Raja Said memeluk Islam, bahkan Raja Said sendiri akhirnya menjadi penganut Islam yang baik. Disamping pendapat diatas, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Islam di Rokan berasal dari Lima Koto (Bangkinang, Kuok, Salo, Rumbio, dan Air Tiris) yang terletak di tepi sungai Kampar Kanan.⁵

Adapula yang berpendapat bahwa Islam yang masuk ke Rokan datang dari Aceh (Kesultanan Samudera Pasei) pada abad ke-14 M. Kesultanan Pasei inilah

³ Suwardi dkk, *op.cit.*, hlm. 30

⁴ Dediarmann, *Kuntu Darussalam :Mula-Mula Islam Masuk Di Riau*, (Tanjung Pinang: Badan Pelestarian Nilai Budaya, Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, 2014), hlm.1

⁵ Suwardi dkk, *op.cit.*, hlm. 31

yang kemudian mensponsori berdirinya Kesultanan Rokan bernama Kesultanan Kunto Dar al-Salam, yang dalam perkembangannya sejajar dengan Kesultanan Aceh Dar al-Salam. Akan tetapi dalam abad ke 14 itu juga, Kesultanan Kunto Dar al-Salam diserang Majapahit. Baru pada abad ke-16, terutama melalui tokoh Syekh Burhanuddin diintensifkan kembali penyebaran Islam. Syekh Burhanuddin bukan hanya sebagai mubaligh, tetapi juga bertindak sebagai guru.⁶

Dari Kuntu-Kampar dan Kuntu Dar al Salam, Islam menyebar ke Kuantan dan Indragiri. Diantara ulama yang berjasa menyebarkan Islam ke daerah ini adalah Syekh Burhanuddin al-Kamil (wafat 610 H/ 1214 M). Islamisasi yang dilakukan Syekh ini sampai ke Kuantan, terus ke hilirnya Muara Sungai Indragiri, seperti Sapat dan Prigiraja. Sumber lain menyebutkan masuknya Islam ke Indragiri melalui pantai barat Sumatra, dibawa oleh ulama bernama Sayed Ali al-Idrus. Jalur-jalur yang dilaluinya adalah dari Hadramaut singgah di Samudera Pasei, dan Sampai di Pantai barat Sumatra, tepatnya Kota Air Bangis. Di daerah ini ia tinggal berapa lama dalam tugas mengembangkan agama Islam. Kemudian menuju timur dan sampai ke Kesultanan Siak, terus ke Pelalawan.⁷

Beberapa teori tentang tempat asal datangnya Islam ke Riau, *antara lain teori dari india, teori dari China dan teori dari Tanah Arab.*

1. Teori dari india

Teori dari india ditemukan oleh Dr. Snouck Hurgronje “ *seolah sebagian bangsa india memeluk Islam maka orang-orang Islam dari india turut mengambi lalu lintas dan emigrasi di Nusantara, dan mereka itulah*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid hlm 32*

yang memasukan Islam ke wilayah Nusantara” kemudian pendapat ini menjadi populer dan sebagian orientalis menyetujuinya, diantaranya R.O Winstedt, B. Harrison, dan lain-lain.

a. Alasan dalam mengukuhkan Teori dari India

- 1) Batu batu nisan awal yang dijumpai di alam Melayu telah diimpor dari Kambay (Kembayat) Gujarat.
- 2) Peranan penting yang dimainkan oleh pedagang-pedagang Gujarat di Kepulauan Melayu dan Kesannya terhadap penyebaran Islam
- 3) Tradisi kesusastraan Melayu lebih mirip tradisi India Islam
- 4) Catatan Marco polo dan Ibn Batutah yang pernah melawat ke alam Melayu sekitar abad ke-13 dan 14 M.
- 5) Ditemukannya makam Sultan Malik al-Saleh pemerintah Pasei yang disebut dalam *Sejarah Melayu dan Hikayat Sultan-Sultan Pasae* sebagai pemerintah pertama di Kepulauan Melayu.
- 6) Kekukuhan teori Islam hanya tersebar sekitar abad 13 M. ⁸

b. Kelemahan teori dari India

Kajian mutakhir menunjukkan hubungan di antara alam Melayu dan Tanah Arab sebelum lahirnya Islam. Tidak tepat jika dikatakan batu nisan yang dijumpai menyerupai India. Jadi, Islam bukan berasal dari India. ⁹

Bukan hanya pedagang India saja yang berdagang di alam Melayu tetapi juga dari tempat lain seperti China. Pedagang arab yang pergi ke

⁸ Abdul Kadir, *Sejarah Masuknya Islam di Riau*, (Pekanbaru: Perpustakaan Nasional RI, 1999), hlm. 114

⁹ *Ibid.*

Canton juga singgah ke alam Melayu sekurang-kurangnya untuk mendapatkan bekal atau menunggu angin yang sesuai untuk meneruskan pelayaran mereka dan masa inilah yang mereka gunakan untuk berdagang. Tradisi Kesusastaan mulai berkembang jauh setelah Islam lama menginjak dan berkembang luas di India.¹⁰

2. Teori dari China

- a. Prof. S.Q. Fatimi menyatakan bahwa perpindahan besar-besaran orang Islam dari Canton 876 M atau 878 M akibat pemberontakan yang terjadi dan menjatuhkan korban hingga 100.000 – 150.000 orang Islam membuat mereka pergi menuju alam Melayu yang diantaranya menurut S. Naquib ke Kedah dan Palembang, selain itu mereka ditengarai juga menuju ke Champa, Brunei, pantai timur Tanah Melayu (Patani, Kelantan, Terengganu, dan Pahang,) serta Jawa Timur.
- b. Bukti dari batu nisan Syekh Abdul Qadir di langgar, Kedah, Batu bertuliskan Phan-rang di Kamboja, batu nisan Pahang dan batu bertuliskan Terengganu 1303 M. pengaruh China ini dibuktikan dalam bentuk masjid di Malaka dan Jawa yang berbentuk seperti pagoda.
- c. Bukti yang di temukan cukup meyakinkan, tetapi tidak bermakna bahwa Islam hanya pada masa itu baru diperkenalkan di alam

¹⁰ Suwardi dkk, *op.cit.*, hlm 34

Melayukarena telah ada penempatan Islam di awal tarikh tersebut terutama di Utara Sumatra.¹¹

3. Teori dari Tanah Arab

Teori ini mendapat banyak dukungan pada masa sekarang. Beberapa buktinya, antara lain sebagai berikut.

- a. Menurut Hamka, ada bukti orang Arab telah berlayar ke Indonesia sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk membeli rempah ratus dan kapur barus yang hanya terdapat di Sumatra. Peta lokasi alam Melayu telah lama berada dan dimiliki oleh orang Arab.
- b. Pada abad ke-7 M. Islam telah sampai ke Sumatra ketika Muawiyah bin Abi Sofyan mengirim utusan ke Raja Sriwijaya. Begitu pula Umar bin Abd Azis telah mengingatkan dakwah dan perniagaan di alam Melayu.
- c. Pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Malik mengirim 35 buah armada ke Muara Sabak di Jambi. Armada inilah yang disebut-sebut berangkat dari Ceylon ke Palembang pada tahun 717 M. sebelum ke China.
- d. Pedagang Arab. Telah berdagang di alam Melayu sebelum Islam masuk. Karena mereka telah memeluk agama Islam maka mulailah Islam masuk di alam Melayu. Sebagian besar mereka adalah pedagang dari Yaman, Hadramaut, dan Oman. Islamisasi yaman oleh Ali bin Abi Thalib mempunyai implikasi terhadap proses Islamisasi alam

¹¹ Abdul Kadir, *op.cit.*, hlm 115

Melayu karena merekalah yang menyebarkan Islam ketika singgah di alam Melayu.

- e. Bukti catatan sejarah pengislaman sultan-sultan di alam Melayu dilakukan oleh pendakwah dari Timur Tengah. Sebagai contoh, Mahasultan Drebar II yang memerintah kedah pada 1136 M telah memeluk Islam dari S. Abdullah bin S. Ahmad dari Yaman dengan memakai nama baru Sultan Muzafar Shah. Prameswara juga masuk Islam dari Syekh Abdul Azis dari Jeddah dan berganti nama menjadi Sultan Muhammad Syah.
- f. Islam telah sampai sejak pertama Hijriah (abad ke 7M), terdapat perkampungan Islam di Utara Sumatra yang dikenal sebagai Ta-Shih.
- g. Pengaruh Arab dalam bahasa Melayu seperti *kitab*, *surat*, *kertas*, dan sebagainya. Begitu juga dengan nama orang Melayu yang berunsurkan budaya Arab.
- h. Terdapat di alam Melayu keturunan Arab seperti *Syed dan Syarifah*.¹²

Dari ketiga teori di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Islam telah datang ke tanah Melayu sejak Abad ke 7M. akan tetapi, baru berkembang pesat sejak abad 11-15 M. yakni sejak berdirinya Kerajaan Islam di tanah Melayu yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh pelosok alam Melayu.

Pada awal latar belakang disebutkan bahwa mula Islam masuk ke Riau yaitu di Kuntu, yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Gunung Sahilan.

¹² Suwardi dkk, *op.cit.*, hlm. 36

Gunung Sahilan adalah sebuah wilayah di daerah Kampar Kiri Provinsi Riau yang sudah dikenal sejak dahulu kala. Secara kronologis daerah ini silih berganti berada dibawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, kemudian Kerajaan Majapahit, kemudian Kesultanan Melayu dan Kesultanan Kampar.¹³ Salah satu faktor yang menyebabkan daerah ini begitu terkenal ialah karena disini berdiri sebuah Kerajaan Islam yang di beri nama Kesultanan Gunung Sahilan.¹⁴

Untuk mengungkap posisi daerah Gunung Sahilan ini perlu ditelusuri terlebih dahulu wilayah-wilayah yang pernah menjadi kekuasaan kerajaan-kerajaan terkenal seperti Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit, selanjutnya berpindah dari dua kerajaan tersebut ke dalam kekuasaan kerajaan Islam.

Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah Kerajaan maritime sangat besar dan terkenal karena kekuasaannya sangat luas dan perekonomian kuat. Kemajuan Kerajaan ini di topang oleh perdagangan di nusantara yang banyak menggunakan transportasi perairan. Barang dagangan yang banyak dimiliki Kerajaan Sriwijaya di Riau ini adalah lada dan timah. Daerah yang banyak menghasilkan lada adalah daerah sepanjang sungai Kampar Kiridan Kampar Kanan, Kuantan Singingi, dan daerah Batang hari, Timah banyak dihasilkan di daerah Kedah, (semenanjung Melayu) sei, Tapung (Petapahan) di hulu sungai Siak. Emas banyak dihasilkan di Kuatan Singingi.¹⁵

¹³ Afrizal, M dan Kurnia Ilahi, *Sejarah Kerajaan Gunung Sahilan*, Laporan Penelitian, (Kuansing: Balitbang Agama Jakarta, 2011), hlm 1

¹⁴ Muchtar Lutfi, dkk, *op.ci.t*, hlm 357

¹⁵ Ibid.

Kerajaan Sriwijaya memiliki banyak pelabuhan sebagai jalur transportasi bagi perdagangan yang utama. Muara Takus tempo dulu adalah salah satu pelabuhan yang terletak dipinggir sungai Kampar Kanan dan Gunung Sahilan di pinggir sungai Kampar Kiri. Kedua sungai ini bermuara ke Selat Malaka yang menjadi jalur dagang, Tenas Efendi¹⁶ mengatakan bahwa daerah Gunung Sahilan itu pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, sementara Muara Takus pernah pula menjadi pusat Keagamaan Kerajaan ini. Istana Kesultanan Gunung Sahilan yang masih berdiri kokoh, walaupun sudah dimakan usia adalah symbol dari kerajaan itu dan Candi Muara Takus yang masih ada sampai sekarang adalah menjadi bukti kuat bagi aktifitas keagamaan kerajaan ini.¹⁷ Dua aliran sungai yang menelusuri daerah Kampar Kanan dan Kampar Kiri inilah yang dijadikan Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat keagamaan dan pusat pemerintahan Kerajaan.

Karena kondisi yang strategis ini daerah Gunung Sahilan dan daerah Muara Takus sangat tepat dijadikan sebagai pusat bagi Kerajaan Sriwijaya. Dalam buku sejarah Riau dikatakan bahwa ekspansi Kerajaan Sriwijaya untuk pengembangan kekuasaan bertolak dari satu tempat yang bernama Minanga Tamwan yang berarti pertemuan antara dua sungai. Pertemuan dua sungai yang terdapat di daerah ini

¹⁶ Seorang Sejarawan Riau (79 Tahun) Yang Penulis Wawancarai Hari Rabu Tgl 03 Desember 2014

¹⁷ Muara Takus adalah nama sebuah kompleks Candi yang nama desa yang terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar. Pada mulanya Takus adalah nama sebuah Sungai yang bermuara ke sungai Kampar Kanan, terletak disebelah kompleks Candi istilah Takus itu berasal dari bahasa Cina Ta-Ku-Se yang berarti Candi Tua. Candi ini adalah satu dari 7 Candi yang terdapat di kompleks itu. Adapun Muara Takus menjadi sebuah kerajaan yang sebelumnya bernama kerajaan Sijangkang, kemudian berubah lagi kerajaan Katangka

adalah antara sungai Kampar Kiridan Kampar Kanan.¹⁸ Kampar Kiri mengarah ke Gunung Sahilan dan Kampar Kanan mengarah ke Muara Takus. Inilah salah satu faktor yang menopang kemajuan Kerajaan Sriwijaya di daerah Riau.

Setelah Kerajaan Sriwijaya runtuh (abad ke XIII akhir), Kesultanan Gunung Sahilan berada dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Hampir semua wilayah yang dahulu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya beralih dan mengabdikan kepada Kerajaan Majapahit. Daerah Majapahit pada mulanya tidak begitu luas, hanya meliputi daerah Kediri daerah Singasari, Madura dan Mojokerto. Tidak lama setelah menjadi raja, Raden Wijaya memerintahkan raja Singasari bernama Kartanegara untuk mengirim pasukan ke daerah Melayu. Pasukan ini dipimpin oleh Kebo Anabrang dan ekspansinya membawa hasil yang gemilang Sultan Melayu memberi persembahan sebagai tanda bakti kepada Majapahit. Persembahan itu berupa dua putri yaitu Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Petak dijadikan Istri Raden Wijaya dan Dara Jingga menjadi istri salah seorang bangsawan Majapahit.¹⁹ Semenjak inilah Melayu berada dibawah kekuasaan Majapahit, penguasa Melayu merupakan contoh bahwa Majapahit menerima tindakan politik yang dilakukan Kartanegara dari Kerajaan Singasari.²⁰ Dengan ini dapat dipastikan bahwa Gunung Sahilan yang berada dalam wilayah Melayu ini juga ikut tunduk kepada Majapahit.

Dalam buku *Negarakertagama* dikatakan wilayah Majapahit adalah perwujudan dari sumpah Palapa meliputi “Semenanjung Malaya, Jawa, Sumatera,

¹⁸ Muchtar Lutfi, dkk, *op.cit.*, hlm 93

¹⁹ Esa Damar Penuluh, *Pesona Majapahit*, (Jogyakarta: Buku Biru, 210), hlm 20

²⁰ *Ibid.*, hlm 22

Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya. Wilayah Sumatera meliputi Palembang, Jambi, Kritang, Tebo, Dharmas Raya, Kandis, Kawasan Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar termasuk Gunung Sahilan, Panai, Kampai, Mandailing, Temiang, Periak, Gayo, Lawas, Samudra, Lamuri, Batan, Lampung dan Baras.²¹

Kekuasaan Majapahit atas wilayah Sumatera demikian juga daerah lainnya bukanlah sifat penaklukan, tetapi lebih bersifat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan yang bertujuan mempersatukan Nusantara. Karena itu Majapahit tidak mencampuri urusan daerah yang berada di bawah kekuasaannya. Hubungan pusat dengan daerah ditunjukkan dengan pembayaran upeti setiap tahun dan kunjungan penguasa daerah ke Istana Majapahit pada waktu-waktu tertentu.²²

Berdasarkan fakta sejarah yang dikemukakan di atas ternyata daerah Gunung Sahilan sudah menjadi tempat penting semenjak masa Sriwijaya dan Majapahit.

Dengan demikian, Kesultanan Gunung Sahilan adalah satu Kerajaan Islam yang diwarisi dari Kerajaan Budha-Hindu terdapat di daerah Riau tempo dulu. Kesultanan ini sudah berdiri sebagai pusat pemerintahan. Kerajaan-kerajaan itu mempunyai tingkat yang berbeda sesuai dengan kemajuan, status kekuasaan, luas wilayah dan kecepatan kemajuan yang dicapai oleh masing-masing kerajaan itu.

²¹*Ibid.*, hlm. 34

²²*Ibid.*, hlm. 51

Setelah Majapahit runtuh, pada tahun 1518 M pada masa kepemimpinan Patih Udara²³, Gunung Sahilan yang terletak di daerah Riau berada di bawah Kesultanan Melayu. Demikian juga semua kerajaan yang ada di daerah ini mengabdikan kepada Melayu. Di Riau berdiri Kerajaan-kerajaan yang cukup terkenal seperti Kerajaan Siak, Kerajaan Indragiri, Kerajaan Rokan, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Kampar, Kerajaan Gasib, Kerajaan Kritang, Kerajaan Kuantan, Kerajaan Riau Lingga dan Kerajaan Ketangka. Di samping itu juga terdapat Kerajaan yang kurang terkenal seperti Kerajaan Gasib, Kerajaan Kritang, Kerajaan Segati dan sebagainya. Keberadaan Kerajaan-kerajaan ini menjadi identitas bagi Indonesia pada umumnya dan Riau pada khususnya. Disamping itu kerajaan-kerajaan tersebut menjadi fenomena bagi sistem politik, sistem pemerintahan yang berjalan ketika itu serta kualitas bagi nasionalisme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Kerajaan-kerajaan tersebut merupakan aset bangsa yang harus diketahui dan digali lebih mendalam. Kerajaan-kerajaan di Riau ini cukup banyak salah satunya adalah kerajaan Gunung Sahilan, adapun kontribusi Kesultanan dan rakyat Kesultanan Gunung Sahilan bagi kemerdekaan cukup besar, terutama dukungan kesultanan terhadap kemerdekaan dan kontribusi rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan pada masa agresi militer Belanda I dan II dimana wilayah Kesultanan Gunung Sahilan adalah basis pertahanan militer Republik

²³ Slamet Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Kerajaan Islam di Nusantara*, (Jogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 12.

dengan nama Resort Riau selatan yang tidak pernah mampu ditembus oleh agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II.²⁴

Maka fokus penelitian ini hanya pada Kesultanan Gunung Sahilan, penekanannya pada “ Sistem pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan 1905-1942

B. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Struktur Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan (1905-1942)
- b. Syarat menjadi Sultan
- c. Proses pemilihan Sultan
- d. Pola Pemerintahan Gunung Sahilan
- e. Pemerintahan daerah
- f. Sumber Kekuasaan Sultan Gunung Sahilan
- g. Wewenang Sultan Gunung Sahilan
- h. Perundang-undangan Kesultanan Gunung Sahilan
- i. Kerapatan musyawarah Kesultanan Gunung Sahilan

2. Batasan masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Sistem pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan (1905-1942); Struktur Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan, syarat menjadi sultan, proses pemilihan sultan, pola Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan, pemerintah

²⁴*Pekanbaru Pos*, 28 November 2016, hlm.9

daerah, sumber kekuasaan Sultan Gunung Sahilan, wewenang Sultan Gunung Sahilan, perundang-undangan Kesultanan Gunung Sahilan, kerapatan musyawarah Kesultanan Gunung Sahilan.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, dapatlah dirumus masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana stuktur Kesultanan Gunung Sahilan (1905-1942)
- b. Apa syarat menjadi Sultan
- c. Bagaimana proses pemilihan Sultan
- d. Bagaimana pola Pemerintahan Gunung Sahilan
- e. Bagaimana Pemerintahan daerah
- f. Bagaimana sumber kekuasaan Sultan Gunung Sahilan
- g. Apa wewenang Sultan Gunung Sahilan
- h. Apa perundang-undangan Kesultanan Gunung Sahilan
- i. Bagaimana kerapatan Musyawarah Kesultanan Gunung Sahilan

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu : (1) untuk mengetahui sistem Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan yang terdiri dari; struktur Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan, syarat menjadi Sultan, proses pemilihan Sultan, pola Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilandan pemerintah daerah, sumber kekuasaan SultanGunung Sahilan, wewenang

Sultan Gunung Sahilan, pertanggung jawaban Sultan Gunung Sahilan (2) untuk mengetahui perundang-undangan Kesultanan Gunung Sahilan dan (3) untuk mengetahui kerapatan musyawarah Kesultanan Gunung Sahilan.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kalangan akademik. Penelitian ini dapat menemukan teori baru tentang politik dalam Islam, dan bagi peneliti serta pemerhati hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

1. Sebagai bahan penelitian tentang Sistem Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan sangat penting dilakukan, dengan suatu pertimbangan hukum Kesultanan Gunung Sahilan merupakan warisan Kerajaan Islam 1905-1942, yang berdiri di atas puing-puing Kerajaan Sriwijaya yang Budha dan Kerajaan Majapahit yang Hindu.
2. Penelitian ini menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan wacana hukum Islam.
3. Sebagai khazanah pustaka budaya atas Kerajaan Islam yang pernah ada di Nusantara.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang penulis temukan tentang Kesultanan Gunung Sahilan.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Ernita, skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru, tahun 2003, berjudul *Pelaksanaan Hukum Adat Kewarisan Pada Kesultanan Gunung Sahilan Dalam Perspektif Hukum*

Islam. Penelitian ini memfokuskan kepada sistem pembagian harta warisan pada Kesultanan Gunung Sahilan dan perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan tersebut. Hasil penelitian pembagian harta warisan tersebut, menunjukkan bahwa hukum adat yang dipakai pada Kesultanan Gunung Sahilan adalah undang-undang adat Gunung Sahilan. Dalam menetapkan hukum bersumber kepada 5 (lima) dasar yaitu, undang-undang adat, cupak, adat lama pusaka usang, adat yang diadatkan dan kata mufakat. Kelima sumber ini dijalankan menurut perkembangan dan pertumbuhan hukum adat itu sendiri. Undang-undang adat Kesultanan Gunung Sahilan ini mencakup keseluruhan adat istiadat termasuk warisan yang disebut hukum adat waris. Adat waris Kesultanan Gunung Sahilan dalam pembagian warisan memakai azas musyawarah dan harta yang berasal dari pewaris tersebut dibagi-bagi menurut yang telah dimusyawarahkan, dengan tidak melanggar ketentuan adat. Ketentuan adat menghendaki agar anak perempuan lebih diutamakan dalam mendapatkan harta peninggalan dibanding dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat rumah beserta isinya jatuh kepada anak perempuan bungsu. Harta pusaka itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu harta yang dapat diwarisi dan harta yang tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang mana harta tersebut terbagi pula kepada dua macam yaitu *harta soko* dan *harta pusaka*.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Marleily Rahim A, berjudul *Sistem Pemerintahan Adat Melayu di Rantau Kuantan dan Gunung Sahilan*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan adat dibekas

Kesultanan Kuantan dan Gunung Sahilan diketahui bahwa adat yang sama karena latar belakang sejarah yang hampir sama. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pranata adat dan agama masih berperan dalam masyarakat pedesaan di Melayu. Untuk memperlancar pembangunan, sebaiknya semua pembaharuan yang diperkenalkan dicari rujukannya pada pranata adat dan agama, agar partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan lebih meningkat.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Afrizal M dan Kurnial Ilahi, pada tahun 2011 berjudul “*Sejarah Kerajaan Gunung Sahilan*”. Penelitian ini mengungkapkan tentang sejarah dari awal berdirinya sampai akhir masa Kerajaan Gunung Sahilan. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, belum ada kajian yang secara khusus meneliti tentang *Sistem Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan 1905-1942*. Dengan demikian, sejauh pengamatan penulis, penelitian disertasi ini menunjukkan suatu yang tidak sama dengan penelitian yang pernah ada atau yang sedang dilakukan oleh pihak lain.

F. Kerangka Teoritis

Teori Pemerintahan Islam

Pemikiran politik Islam pada umumnya merupakan produk “perdebatan besar” yang terfokus masalah religi politik tentang Imamah dan Kekhalifahan. Madinah merupakan tempat yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW untuk menetap setelah teraniaya di Mekah. Dalam teori dan praktek, Nabi Muhammad SAW menempati suatu posisi yang unik sebagai pemimpin dan sumber spritual undang-undang Ketuhanan, sekaligus juga pemimpin

pemerintahan Islam yang pertama. Kerangka kerja konstitusional pemerintahan ini terungkap dalam dokumen terkenal yang disebut dengan “Konstitusi Madinah”.²⁵

Sistem pemerintahan masa Nabi Muhammad SAW terus dilanjutkan oleh para Khalifah sepeninggal beliau dengan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan kultural yang terjadi pada masanya dengan tetap mengacu kepada Sunnah Nabi. Seperti yang dilakukan Umar bin Khattab pada saat mengangkat Abu Bakar Shiddiq menjadi Khalifah dan yang dilakukan Abu Bakar Shiddiq pada saat memilih penggantinya atau yang dilakukan Umar bin Khattab ketika menyerahkan kekuasaannya kepada Usman bin Affan, begitu seterusnya sampai kepada khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, semuanya merupakan masalah *ijtihadiah* dalam politik, pemikiran politik.

Semua pemikiran politik Islam menjadikan Nabi Muhammad SAW dan para Sahabatnya menjadi acuan untuk merumuskan seperangkat teori dan sistem pemerintahan. Teori-teori politik yang dirumuskan oleh para pemikir Islam itulah yang dimaksudkan dengan pemikiran politik. Atau politik menurut pemikiran para tokoh Islam yang dapat dipahami dan dipraktekkan dalam sistem pemerintahan Islam.

1. Prinsip-prinsip Pemerintahan Islam

Menurut ajaran Islam, untuk mengatakan bahwa suatu pemerintahan dapat disebut *Khilafah Islamiyah* atau Negara Islam harus memenuhi

²⁵ John Williams, *Themes of Islamic Civilization*, University of California Press, 1971, hlm. 12.

beberapa prinsip dan kriteria.²⁶ Prinsip *pertama* yang harus diyakini dan dipegangi adalah bahwa seluruh kekuasaan di bumi ini ada pada Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Prinsip *kedua* adalah bahwa syariah Islam telah ditetapkan Allah untuk membimbing Umat manusia dalam menjalankan fungsi Khilafahnya di bumi ini. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, suatu negara yang diatur menurut syariah Islam secara teknis disebut *Khilafah al-Islamiyah* atau *Dar al-Islam*.²⁷ Menurut Qamaruddin Khan, negara yang terikat oleh kaidah yang demikian dapat dinamakan sebagai negara agama (*religious state*).²⁸

Lebih jauh dikatakan oleh Iqbal bahwa suatu negara disebut negara Islam apabila memenuhi tiga kriteria. Tiga kriteria itu adalah : *ummah* (masyarakat Muslim), *syariah* (diberlakukannya hukum Islam), dan *Khalifah* (kepemimpinan masyarakat muslim). Tanggung jawab seorang Khalifah atau kepala negara adalah melaksanakan Syariah Islam dengan dipandu oleh tujuan pembentukan Negara Islam (*Khilafah Islamiyah*) yaitu menuju kebahagiaan (*falah*). Negara atau *Khilafah* menjadi sarana untuk mengantarkan masyarakat Muslim mencapai keberhasilan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Adapun prinsip-prinsip yang harus

²⁶Prinsip-prinsip Negara Islam secara rinci dapat dilihat dalam buku tulisan Abu A'la al Maududi, *Sistem Politik Islam, op. cit.*, hlm. 352 – 355.

²⁷Hakim Javid Iqbal, “Konsep Negara Dalam Islam” dalam Mumtaz Ahmad (ed.) Teori Politik Islam, terjemahan. Ena Hadi, (Bandung : Mizan, 1996), 57 – 58.

²⁸Qamaruddin Khan, *Negara al-Mawardi*, terjemahan. Karsidi Diningrat (Bandung: Pustaka, 2002), hlm. 4

dipegangi ketika menjalankan pemerintahan adalah prinsip musyawarah, keadilan, persamaan hak, kemerdekaan dan solidaritas.²⁹

Kepala pemerintahan masyarakat Muslim disebut *Khalifah* atau *Imam*. Untuk menempati posisi sebagai Khalifah ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. Para ulama pada masa klasik telah mencatat dan mensyaratkan adanya kriteria-kriteria ini. Ibn Abi Rabi' misalnya, mengemukakan enam persyaratan yang harus dipenuhi seorang Khalifah, yaitu: (1) anggota dari keluarga sultan, dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan sultan sebelumnya, (2) aspirasi yang luhur, (3) pandangan yang mantap dan kokoh, (4) ketahanan dalam menghadapi kesukaran dan tantangan, (5) kekayaan yang besar, dan (6) pembantu-pembantu yang setia.³⁰

Filosof Muslim al-Farabi menentukan adanya dua belas persyaratan bagi mereka yang akan menjadi seorang Khalifah. Kedua belas persyaratan itu adalah: (1) lengkap anggota badannya, (2) baik daya pemahamannya, (3) tinggi intelektualitasnya, (4) pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya, (5) pecinta pendidikan dan gemar mengajar, (6) tidak loba atau rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita, (7) pecinta kejujuran dan pembenci kebohongan, (8) berjiwa besar dan berbudi luhur, (9) tidak memandang pentingkekayaan dan kesenangan-kesenangan duniawi yang lain, (10) pecinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim, (11) tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan dan sebaliknya sulit untuk

²⁹Mumtaz Ahmad (editor), *Teori Politik Islam*, terjemahan Ena Hadi, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.58.

³⁰Munawir Sadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 48.

melakukan dan menyetujui tindakan keji dan kotor, dan (12) kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi semangatnya, bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.³¹

Menurut al-Mawardi, *ahl al-imamah*, atau mereka yang berhak menempati jabatan imam atau kedudukan sebagai Khalifah harus memenuhi tujuh kriteria. Ketujuh kriteria itu adalah : (1) sikap adil dengan semua persyaratannya, (2) ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad, (3) sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya, (4) utuh anggota tubuhnya, (5) wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum, (6) keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengenyahkan musuh dan (7) keturunan Quraisy.³²

Kriteria yang dikemukakan al-Ghazali sebagai persyaratan seorang Imam dan Khalifah ada sepuluh. Kesepuluh kriteria itu adalah : (1) dewasa atau aqil-baligh, (2) otak yang sehat, (3) merdeka dan bukan budak, (4) laki-laki, (5) keturunan Quraisy, (6) pendengaran dan penglihatan yang sehat, (7) kekuasaan yang nyata, (8) hidayah, (9) ilmu pengetahuan, dan (10) *wara*, kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela.³³ Imam al-Ghazali memberikan tambahan keterangan pada beberapa syarat di atas. Berkaitan dengan syarat yang ketujuh, yaitu kekuasaan yang nyata, ia menambahkan tersedianya perangkat

³¹*Ibid.*, hlm. 56.

³²*Ibid.*, hlm 63-64. Lihat Ali ibn Muhammad ibn Habib Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulythaniyah al-Wilayah al-Diniyyah*, (Kuwait : Maktabah Dar Ibnu Qutaibah, 1989), hlm. 8.

³³Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin al-Thusi al-Ghazali, *Ihya 'Ulumu al-Din*, (Beirut; Dar al-Fikr 1997), Juz I, hlm. 20.

kekuasaan yang memadai, antara lain meliputi angkatan bersenjata. Sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat kedelapan, yaitu hidayah, adalah adanya daya pikir dan daya rancang yang kuat dan ditunjang oleh kesediaan bermusyawarah, mendengarkan pendapat serta nasihat dari orang lain. Kemudian, berkaitan dengan syarat yang kesembilan, yaitu ilmu pengetahuan, seorang Imam atau Khalifah tidak disyaratkan memiliki ilmu pengetahuan seluas atau seberat seperti halnya seorang ulama.³⁴

Dalam pandangan Islam, selain kriteria yang harus dipenuhi di atas, seorang Khalifah ketika menduduki jabatannya ia harus mendapatkan *bai'at*³⁵ dan masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim memberikan dan menyatakan kepatuhannya kepada Khalifah, dan Khalifah berjanji akan memerintah sesuai dengan syariah Islam. Menetapkan metode dan mekanisme tertentu untuk mengangkat dan menurunkan seorang Khalifah. Berpegang kepada rambu-rambu yang telah digariskan dalam al-Quran. Salah satu prinsip yang harus dipegangi dalam setiap menyelesaikan masalah seperti diajarkan al-Quran adalah prinsip musyawarah, sebagaimana dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

³⁴*Ibid.*, hlm. 21

³⁵ Bai'at adalah pengakuan atas kepengikutan yang diberikan seseorang kepada orang lain disertai sikap tunduk dan patuh. Bai'at secara umum dipakai dalam bahasa politik untuk menunjukkan pengakuan seorang warga negara atau masyarakat terhadap kedudukan seorang pemimpin (khalifah atau imam). Lihat Mahmud Al-Khalidi, *Bai'at Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*, terj. Muhammad Bajuri (Bangil: al-Izzah, 2002), hlm. 57.

“... Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah” (QS. Ali ‘Imran (3): 159).³⁶

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“... Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antaramereka...” (QS. al-Syura (42): 38).³⁷

Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa segala urusan termasuk urusan kenegaraan harus didasarkan pada prinsip musyawarah. Sistem musyawarah mengakui prinsip-prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan. Ketiga prinsip ini adalah manifestasi dari prinsip demokrasi.

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, yaitu melakukan analisis historis tentang berbagai data, fakta dan sumber sejarah yang berkaitan dengan sistem Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan (1905-1942).

Kemudian menggunakan sejarah lisan, yaitu suatu cara untuk mendapatkan informasi tentang sejarah berdasarkan kesaksian langsung dari pelaku sejarah. Sejarah lisan juga dapat berbentuk ungkapan atau testimony yang ditransformasi dari satu generasi kepada generasi selanjutnya.³⁸ untuk meneliti sejarah Kesultanan Gunung Sahilan, peneliti menggunakan teori sejarah lisan. Teori ini dipakai untuk mengumpulkan data dari wawancara

³⁶Tim Penterjemah Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Macca al-Mukarramah : Khadim al-Haramayn, 1991). hlm. 159

³⁷*Ibid.*, hlm. 138

³⁸ Kuntowijoyo, *Motodologi sejarah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994), hlm. 21

dari para keturunan raja masih hidup dan dari para sejarawan tentang keberadaan Kesultanan Gunung Sahilan.

Penulis membatasi yaitu tentang Sistem Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan 1905-1942 karena pada masa ini adalah masa kejayaan Kesultanan Gunung Sahilan.

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian perlu dirumuskan metode penelitian. Ada beberapa faktor yang perlu dikemukakan terkait dengan unsur-unsur yang perlu dipertegas antara lain:

a. Jenis Data

Yaitu sejumlah data yang akan dibutuhkan antara lain:

- 1) Data lokasi berdiri dan berkembangnya Kesultanan Gunung Sahilan
- 2) Data tentang latar belakang berdirinya Kesultanan Gunung Sahilan
- 3) Data tentang para raja yang pernah berkuasa dan memimpin Kesultanan Gunung Sahilan
- 4) Data-data tentang sistem Kesultanan Gunung Sahilan

b. Sumber data

Setiap data yang diperlukan diambil beberapa sumber, antara lain:

- 1) Data yang berhubungan dengan latar belakang berdirinya kesultanan, raja-raja yang memerintah dan keturunannya, data tentang kemajuan yang sudah dicapai kesultanan, factor-faktor yang mendukung kemajuan itu, diambil dari keluarga kerajaan yang masih tinggal, dari dokumen dan bukti-bukti peninggalan

kesultanan informasi dari para tokoh sejarah, atau siapa saja yang memiliki kemampuan tentang ini.

- 2) Data yang terkait dengan kondisi wilayah kesultanan diambil dari pemerintah, daerah pemuka masyarakat, para ilmuwan, serta orang-orang yang mengetahui kesultanan ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi

Dilakukan untuk mengambil data berdirinya kesultanan berupa bukti-bukti peninggalan kesultanan, istana yang masih ada, dokumen-dokumen, prasasti serta benda-benda kerajaan yang masih tinggal.

2) Wawancara

Dilakukan untuk mengambil data tentang para sultan yang pernah berkuasa, diambil dari keluarga kesultanan yang masih ada sekarang, dari para sejarawan dan budayawan, serta orang-orang yang dianggap mengetahui informasi ini.

d. Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, dilakukan analisa data dengan cara memahami, mendalami, dan memberikan interpretasi seobjektif mungkin. Data data berupa dokumen dan bukti-bukti peninggalan kesultanan didalami dengan memberikan interpretasi yang diperkirakan benar dan tidak jauh dari yang sesungguhnya.

2. Sumber Penelitian

Secara garis besar sumber penelitian ini adalah fakta atau data yang terkait dengan Sistem Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan (1905-1942), meliputi :

a. Sumber primer

- 1) Sejarah Kesultanan Kampar KiriGunung Sahilan (handscrift T.H.Ibrahim, Wazir Kesultanan Gunung Sahilan(1905-1942).
- 2) Sejarah adat istiadat rantau Kampar KiriGunung Sahilan Oleh T. Syukur (anak sultan T. Abdullah Hasan)
- 3) Sejarah Kesultanan Darusalam Gunung Sahilan oleh Darmansyah (cucu sultan T. Abdullah Syiyah)
- 4) SejarahPerjalanan adat Kerajaan Gunung Sahilan Kampar Kirioleh Khalifah Ujung Bukit, H. Munir Dt. Bandaro.

b. Sumber sekunder ;

Yaitu berupa dokumen-dokumen dan buku-buku yang ditulis oleh orang lain tentang Kesultanan Gunung Sahilan serta informasi pewaris Kesultanan Gunung Sahilan. Antara lain :

- 1) Sistem Pemerintahan Adat Melayu di rantau Kuantan dan Kampar Kirioleh Marlaily Rahim A.
- 2) Kemitraan Adat Tali Berpilin Tiga daerah Kampar Riau oleh Ali Akbar Dt. Pangeran.
- 3) Adat Jati Kab. Kampar oleh Tim Penyusun LSM NAKHODA
- 4) Adat dan Institusi Besultan di Alam Melayu Riau oleh Tenas Effendi

- 5) Sejarah Kerajaan Gunung Sahilan oleh Affrizal dan Kurnial Ilahi
- 6) Diaspora Melayu, oleh Suwardi
- 7) Sejarah Riau oleh Team Penyusun dan penulisan Sejarah Riau
- 8) Sejarah Lokal Riau oleh Suwardi dkk
- 9) Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam perubahan oleh Koen Tjara Ningrat, dkk.
- 10) Hukum dan perubahan struktur dan kekuasaan (Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942 oleh Amir Luthfi.

H. Sistematika Penulisan

Disertasi ini sejak awal pembahasannya sampai selesai merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Disertasi ini terdiri dari beberapa bab dan setiap bab terdiri atas beberapa pasal. Pembagian seperti ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, sehingga seluruh sajian yang dikemukakan menjadi lebih sistematis.

Disertasi ini diawali dengan bab pendahuluan, yaitu bagian yang esensinya lebih tertuju kepada pertanggung jawaban ilmiah kajian ini. Uraian-uraian yang dikemukakan pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, permasalahan; identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, signifikansi penelitian, kajian terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengemukakan tentang Sistem Pemerintahan dalam Islam. Sub-sub yang diketengahkan adalah: hubungan agama dengan negara, syarat sebagai seorang

pemimpin, dasar negara dalam Islam, bentuk negara dalam Islam, tujuan pemerintahan Islam, konstitusi dalam Islam, sumber kekuasaan dalam Islam, kekuasaan kepala negara dalam Islam, pelaksanaan kekuasaan dalam Islam, kewenangan melaksanakan kekuasaan dan pertanggung jawaban kekuasaan.

Bab ketiga berbicara tentang Kesultanan Gunung Sahilan 1905-1942 yang terdiri dari sub-sub ; latar belakang historis Kesultanan Gunung Sahilan, teritorial Gunung Sahilan, pusat Pemerintahan Gunung Sahilan, wilayah jajahan Gunung Sahilan, hukum adat dan undang-undang negeri, kekuasaan dan wewenang Kesultanan Gunung Sahilan dan sosial kontrol dalam Kesultanan Gunung Sahilan.

Bab keempat, berbicara tentang Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan 1905-1942. Sub-sub yang dibicarakan: Struktur Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan, Syarat-Syarat Menjadi Sultan, Proses Pemilihan Sultan, Pemerintahan Daerah, Sumber Kekuasaan Sultan Wewenang Sultan Gunung Sahilan, Perundang-undangan kesultanan Gunung Sahilan dan kerapatan Musyawarah

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari: kesimpulan yang memuat natijah dari disertasi ini dan diakhiri dengan saran-saran penulis.